

**BAB III**  
**DESKRIPSI ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG**  
**NO.21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG**

**A. Deskripsi UNDANG-UNDANG No.21 Tahun 2007**

Undang-Undang NO. 21 Tahun 2007 merupakan Undang-Undang hasil perluasan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).<sup>1</sup> Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

---

<sup>1</sup><http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang>.diakses pada tanggal 31 oktober 2012

orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.

Undang-Undang Perdagangan Orang memiliki kaitan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) karena pelanggaranannya sama-sama melanggar hak dasar seseorang untuk mendapatkan kemerdekaan di depan hukum. Dengan adanya Undang-Undang ini harapan untuk mengangkat derajat manusia di mata hukum, negara dan Internasional. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 lebih memperhatikan perlindungan Perempuan dan Anak karena sesuai dengan realita yang sering terjadi. Namun, ketika berhadapan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang lain penyelesaiannya tetap melihat Criminal Code-nya baru diikuti dengan yang lain.

Istilah-istilah yang berkaitan dengan Undang-Undang perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007:

1. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

5. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
6. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
7. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
8. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

11. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
12. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
13. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadi.

## **B. Aspek Tindak Pidana dan Sangsi Pidana Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007**

### **1. Aspek Tindak Pidana**

Mempelajari tindak pidana perdagangan orang tidak dapat di pisahkan dari hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang *inherent* yang di punyai oleh setiap manusia sebagai makhluk tuhan dan anugerah tuhan kepada semua hamba Nya tanpa pandang bulu. Hal ini berarti HAM adalah hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak tersebut tidak mungkin manusia mempunyai martabat. Karena itu HAM tidak bisa di cabut (*inalienable*) dan tidak boleh di langgar (*inviolable*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*: Sinar Gravika, Jakarta Timur, 2011, hal : 118

Hak dan kewajiban merupakan suatu yang melekat dan menyatu dalam hukum. Namun di lihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual dan selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Disamping itu, karena hukum bukan hanya mengatur individu di dalam pergaulan masyarakat sebagai salah satu komunitas, maka hak asasi sebagai individual berkonotasi pula dengan HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak asasi manusia” dan HAM dalam arti Hak asasi masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.

Dalam literature system hukum di Indonesia, konsep HAM merupakan penjabaran dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila. Pancasila mengakui adanya aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Aspek kemanusiaan merupakan hak untuk hidup. Dan hak untuk melangsungkan kehidupan. Hal ini tercermin dari sila ke dua dan karenanya setiap manusia berhak untuk mempertahankan dari berbagai serangan atau ancaman yang tertuju pada dirinya. Hak hidup merupakan Hak asasi manusia yang paling mendasar, sehingga perampasan kemerdekaan termasuk perbudakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan sila ke dua pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” penggunaan hak seseorang dalam konteks HAM tidak boleh di salah gunakan, sehingga hak seorang tidak boleh melanggar hak individu lainnya, atas dasar itu maka penerapan hukum HAM harus menerapkan prinsip-prinsip:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehalibitasi;
4. Hak untuk mendapatkan hukum

Demikian juga dengan aspek kemasyarakatan dari HAM, yaitu hak atas kemerdekaan, hak untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, hak untuk mendapat perlindungan/atau keamanan social, hak untuk memperoleh kesejahteraan, jaminan social dan keadilan sosial, hak untuk hidup sehat, aspek-aspek kemasyarakatan merupakan keseluruhan aspek dari HAM, yang menurut hukum pada hakikatnya merupakan kepentingan hukum, sehingga sudah selayaknya mendapat perlindungan dari hukum pidana.

Secara umum mempelajari aspek-aspek pidana dalam perdagangan orang, meliputi aspek pidana materil (*substantial criminal law*), dan aspek hukum pidana formal/hukum acara pidana (*criminal prosedur/criminal liability*), dan aspek pelaksanaan hukum pidana dan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

## 2. Sangsi Pidana Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

Perdagangan Orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.<sup>3</sup>

Kejadian-kejadian dalam kasus perdagangan orang umumnya diawali dengan modus bantuan pengurusan administrasi dan persyaratan bekerja, walaupun pada akhirnya merupakan penjeratan hutang, dapat digambarkan adanya persamaan dalam perbedaan seperti tabel 3. 1 berikut:<sup>4</sup>

### **Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **A. Buruh Migran<sup>5</sup>**

**Tabel 3. 1: Buruh Migran**

| <b>Model 1</b>  | <b>Model 2</b>   | <b>Model 3</b>   | <b>Model 4</b>   |
|---|--|--|--|
| Gaji di tahan, hanya diberikan sebahagian, atau bahkan tidak diberikan sama sekali. | Hutang dipotong langsung oleh majikan dari upah, tanpa persetujuan/contr ol dari korban. | Setelah pulang ke daerah asal sering korban diminta uang sebagai balas jasa atas bantuan dalam pengiriman ke tempat bekerja. | Buruh tidak boleh pindah bekerja/tanpa seizin/sepengetahuan dari calo/sponsor/penyalur |

---

<sup>3</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal : 166

<sup>4</sup>*Op-cit*, hal : 374

<sup>5</sup>Dr.hj.Henny Nuraeny, SH.M.H, Tindak Pidana Perdagangan orang, hal.374

## B. Eksploitasi Seksual

**Tabel 3. 2: Eksploitasi Seksual<sup>6</sup>**

| <b>Model 1</b>   | <b>Model 2</b>   | <b>Model 3</b>  | <b>Model 4</b>   |
|--|--|---|--|
| Gaji yang dijanjikan tidak sesuai dengan realitas paling hanya diberikan sebagian. | Dibayar sesuai dengan banyaknya tamu/pengunjung yang menggunakan jasanya setelah dipotong biaya hidup dan sewa rumah | Tidak jarang sebelum diserahkan pada germo atau mocikari, korban mengalami paksaan untuk melayani calo tanpa imbalan. | Di perangkap untuk tetap bekerja di tempat asal, sebelum kontrak kerja selesai/dapat keluar apabila korban memberi uang tebusan. |

## C. Kawin kontrak

**Tabel 3. 3: Kawin Kontrak**

| <b>Model 1</b>  | <b>Model 2</b>  | <b>Model 3</b>   | <b>Model 4</b>  |
|---|---|--|---|
| Pembayaran diberikan kepada orang tua korban, sesuai perjanjian tanpa imbalan lain. | Korban hanya mendapatkan uang sesuai belas kasihan laki-laki yang telah menikahi secara kontrak/siri. | Setelah laki-laki yang mengawini kontrak merasa perjanjian selesai, korban akan ditinggal begitu saja, tanpa imbalan apapun. | Laki-laki pelaku kawin kontrak tidak akan melepaskan korban/pasangan sebelum kontrak kawin selesai. |

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 118



## D. Adopsi/Tranpalansi

**Tabel 3. 4: Adopsi/Tranpalansi**

| <b>Model 1</b>  | <b>Model 2</b>  | <b>Model 3</b>   | <b>Model 4</b>   |
|---|---|--|--|
| Untuk modus adopsi diberikan biaya perobatan sejak hamil sampai melahirkan. | Dilakukan dengan penculikan terhadap anak-anak tanpa memberi bayaran pada siapapun. | Orang tua asli tidak boleh berhubungan dengan anaknya yang sudah diadopsi, bahkan keberadaan anak tidak boleh diberitahukan. | Tidak ada ikatan lagi antara orang tua bayi dengan orang yang mengadopsi atau pelaku penjual bayi. |

Adapun contoh kasus tindak pidana perdagangan orang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan sampai ketingkat kasasi sebagai contoh berikut ini:<sup>7</sup>

**a. Putusan Mahkamah Agung No. 1501 K/PID. SUS/2008****1) Kasus posisi sebagai berikut:**

Mahkamah agung memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi dalam perkara terdakwa:

Nama : SANIDI BINTI BASRO  
 Tempat Tanggal Lahir : Cirebon  
 Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Kebangsaan : Indonesia

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal : 380

|                |   |
|----------------|---|
| Tempat tinggal | : Desa Suranenggala Blok Senin RT/02<br>RW/04, Kecamatan Suranenggala,<br>Kabupaten Cirebon |
| Agama          | : Islam   |
| Pekerjaan      | : Ibu Rumah Tangga  |

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut umum sejak tanggal 27 November 2007 s. d tanggal 16 Desember 2007.
2. Hakim pengadilan negara sejak tanggal 11 Desember 2007 s. d tanggal 09 Januari 2008.
3. Perpanjangan olehketua pengadilan negara sejak tanggal 10 Januari 2008 s. d 10 Maret 2008
4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi sejak tanggal 10 Maret 2008 s. d tanggal 08 Mei 2008.
5. Hakim pengadilan tinggi sejak tanggal 09 Mei 2008 s. d tanggal 07 Juni 2008.
6. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi sejak tanggal 08 Juni 2008 s. d tanggal 06 Agustus 2008.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial nomor: 989/2008/S. 479. TAH. SUS/2008/MA tanggal 14 Agustus 2008 untuk paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2008.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial 1990/2008/S. 479. TAH. SUS/2008/MA tanggal 14 Agustus 2008

untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2008.

**b. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No566/PID. B/2007/PN. Sbr tanggal 5 Mei 2008 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

- 1) Menyatakan Terdakwa Sanidi binti Basro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”:
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000, - (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tersebut tidak bisa. membayar pidana denda tersebut maka haru diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun.

**C. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007.**

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus di kenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>8</sup>

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan, menurut KUHP ada

---

<sup>8</sup> *Op-cit*, hal : 131

beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, yaitu

1. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi minimal maksimal dan denda minimal maksimal.
2. Ada pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal;
3. Ada pasal pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal saja.

Ketentuan pidana dalam undang-undang no 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang di uraikan dan di kenakan sanksi, dilihat dari perbuatan perdagangan orang, maka sanksi dapat di bagi jadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Seperti tabel 3. 5 berikut ini

**Tabel 3. 5: Sangsi Tindak Pidana Perdagangan Orang**

| <b>Pasal</b>  | <b>Tindak Pidana</b>                                    | <b>Pidana<br/>Min.</b> | <b>Pidana<br/>Maks.</b> | <b>Denda/Tambah/atau</b> | <b>Pidana<br/>Tambahan</b> |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2             | Perdagangan Orang                                       | 3 Tahun                | 15 Tahun                | +120-600jt rp            | -                          |
| 3<br>dan<br>4 | Perdagangan orang<br>ke dalam atau ke<br>luar Indonesia | 3 Tahun                | 15 Tahun                | +120-600jt rp            | -                          |
| 5             | Perdagangan anak<br>melalui adopsi                      | 3 Tahun                | 15 Tahun                | +120-600jt rp            | -                          |
| 6             | Perdagangan anak<br>ke dalam atau ke                    | 3 Tahun                | 15 Tahun                | +120-600jt rp            | -                          |

|      |  |         |              |                 |                               |
|------|--|---------|--------------|-----------------|-------------------------------|
|      | luar negeri  |         |              |                 |                               |
| 7(1) | Perdagangan orang mengakibatkan lukapisik dan psikis                         | 4 Tahun | 20 Tahun     | +160-800jt rp   | -                             |
| 7(2) | Perdagangan orang mengakibatkan kematian                                     | 5 Tahun | Seumur hidup | +200-5miliar rp | -                             |
| 8    | Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara Negara                        | 4 Tahun | 20 Tahun     | +160-800jt rp   | Pemberhentian tidak terhormat |
| 9    | Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak terjadi   | 1 Tahun | 6 Tahun      | +40-240jt rp    | -                             |
| 10   | Membantu/melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang | 3 Tahun | 15 Tahun     | +120-600jt rp   | -                             |
| 11   | Merencanakan/melakukan pemufakatan   | 3 Tahun | 15 Tahun     | +120+600jt rp   | -                             |

|    |   |         |          |  |   |
|----|---|---------|----------|--|---|
|    | jahat untuk<br>melakukan tindak<br>pidana perdagangan<br>orang  |         |          |  |   |
| 12 | Menggunakan/mema<br>nfaatkan korban<br>tindak pidana orang  | 3 Tahun | 15 Tahun | +120-600jt rp                              | -   |
| 15 | Tindak pidana<br>perdagangan orang<br>dilakukan oleh<br>korporasi untuk<br>pengurusan dan<br>untuk korprasi | 3 Tahun | 15 Tahun | +120-600jt rp<br>360jt-1miliar<br>800jt rp | a. pencabutan<br>izin<br>b. perampasan<br>kekayaan<br>c. pencabutan<br>status badan<br>hukum<br>d. pemecatan<br>pengurus<br>e. pelarangan<br>kepada<br>pengurus<br>mendirikan<br>korporasi<br>bidang usaha<br>yang sama |

|    |  |         |          |               |   |
|----|--|---------|----------|---------------|---|
| 16 | Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir               | 4 Tahun | 20 Tahun | +160-800jt rp | - |
| 17 | Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap anak | 4 Tahun | 20 Tahun | +160-800jt rp |   |